



SUPLEMEN REVISI TOP-UP PNBP

RENCANA KERJA TAHUN 2023

**Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

**HALAMAN BELAKANG COVER
SENGAJA DIKOSONGKAN**



SUPLEMEN REVISI TOP-UP PNBP

RENCANA KERJA

TAHUN 2023

**Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan**



TIM PENYUSUN

Pengarah :

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM.

Penanggungjawab :

Dr. Dwi Januanto Nugroho, S.Hut, M.B.A.

Ketua :

Ardi Risman, S.Hut, MT, M.PSc.

Koordinator :

Novel Arief, S.E.

Anggota :

Asbiyal Nurdin, S.E.

Farida Dwi Cahyani, S.Hut.

Agnes Rumenta Setianty Samosir, S.T.

Octa Dandy Saiyar, S.E, M.M.

Disusun dan diterbitkan oleh :

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Penerbit mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah menyumbangkan tenaga, kreativitas dan keahliannya untuk menyusun dokumen Rencana Kerja ini.



Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4,
Jalan Gatot Subroto, DKI Jakarta.



KATA PENGANTAR

Dokumen Suplemen Rencana Kerja Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK) tahun 2023 ini merupakan dokumen pendukung setelah Proses Penambahan (Top Up) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Tahun Anggaran 2023 yang disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum LHK) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Suplemen Rencana Kerja ini memuat informasi tambahan atas berbagai upaya dan keberhasilan Ditjen Gakkum LHK dalam melaksanakan berbagai tugas yang diembankan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan Rencana Strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Rencana Strategi Ditjen Gakkum LHK tahun 2020 s.d 2024, dengan hasil sesuai rencana yang diharapkan dan secara keseluruhan dapat mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan Suplemen Rencana Kerja ini diharapkan adanya dukungan atas tercapainya optimalisasi peran Ditjen Gakkum LHK di dalam peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Ditjen Gakkum LHK.

**Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan**



DR. RASIO RIDHO SANI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
PENGUNAAN DANA PNBP	iii	
<hr/>		
A. Postur DIPA Tahun 2023	1	
<hr/>		
B. Alokasi Anggaran Top Up PNBP TA 2023	2	
Rencana	<hr/>	
Kerja 2023	C. Automatic Adjustment TA 2023	3
Suplemen	<hr/>	
Top-Up	D. Proyek Prioritas Nasional 2023(S-M)	4
PNBP	<hr/>	
	E. Target Indikator Kinerja Eselon I Tahun 2023 (Semula-Menjadi)	5
	<hr/>	
	F. Target per Rincian Output Tahun 2022 (Semula-Menjadi)	6
<hr/>		
PENUTUP	7	

PENGUNAAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, diatur bahwa Menteri Keuangan berwenang memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diusulkan oleh instansi pengelola PNBP dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara, kebijakan fiskal, dan kebutuhan pendanaan Instansi Pengelola PNBP.

Berkenaan dengan diatas, dapat disetujui penggunaan dana PNBP PSDH dan PNBP pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan lintas unit eselon I pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S.1000 Tahun 2022 tanggal 28 November 2022 dengan ketentuan antara lain: Penggunaan Dana PNBP pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berlaku ketentuan sebagai berikut: Ijin penggunaan PNBP dapat digunakan sesuai target yang telah ditetapkan dalam APBN/P. Khusus penggunaan PNBP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023: PNBP ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup diberikan maksimal sebesar 67% dari realisasi PNBP tahun berjalan dengan maksimal pagu belanja sebesar Rp.33.741.510.924,00. PNBP denda administrasi bidang kehutanan diberikan maksimal sebesar 21% dari realisasi PNBP tahun berjalan dengan maksimal pagu belanja sebesar Rp. 226.193.998.000,00. Penggunaan dana PNBP dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja anggaran kementerian/lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan penggunaan dana PNBP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Revisi anggaran terkait dengan penggunaan dana PNBP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara revisi anggaran.

Menteri Keuangan dapat meninjau kembali persetujuan penggunaan dana PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana PNBP digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

1. Dana PNBP PSDH:

- a. Prakondisi pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan.
- b. Pengamanan hutan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.



- c. Pencegahan dan pemulihan kerusakan hutan, tanah, dan air.
- d. Peningkatan usaha konservasi di dalam dan di luar kawasan hutan.
- e. Pelatihan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan.
- f. Pelatihan tenaga teknis dan fungsional di bidang kehutanan.
- g. Verifikasi Pengelolaan Hasil Hutan dan Luran Kehutanan

2.PNBP Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup

- a.Pemulihan Lingkungan Hidup
- b.Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

3.PNBP Denda Administratif Bidang Kehutanan

- a. Penyelesaian permasalahan penggunaan kawasan hutan terkait pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 2021
- b. Pengawasan dan Sanksi Administratif Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- c. Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- d. Pendukung Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

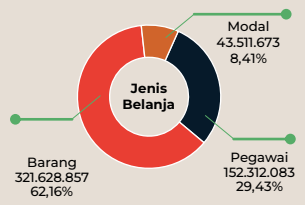
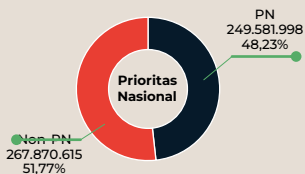
A. POSTUR DIPA TAHUN 2023

(Ribu Rupiah)

PAGU MENJADI
Rp. 517.452.613

PAGU SEMULA
Rp. 354.211.103

AUTOMATIC ADJUSTMENT
Rp. 21.697.366



PHB



PAGU MENJADI : 76.278.947
REALOKASI AA : 1.843.144

KLH



PAGU MENJADI: 173.303.051
REALOKASI AA : 11.500.000

DUKMAN



PAGU MENJADI : 257.662.735
REALOKASI AA : 8.354.222

PNBP 38,61%
199.759.806



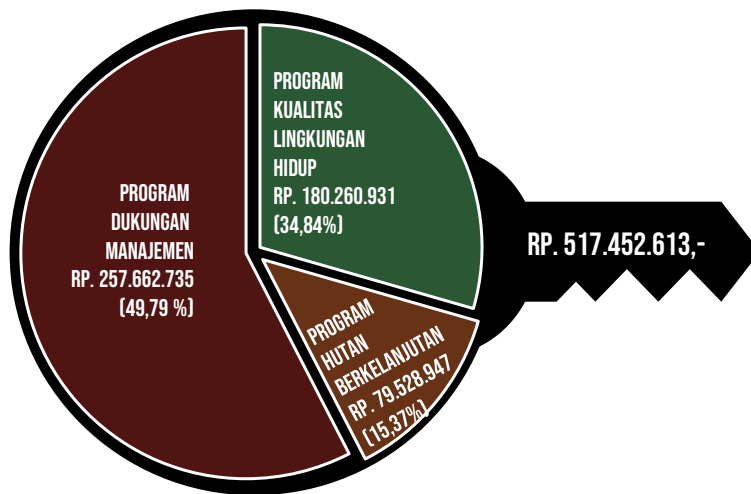
RUPIAH MURNI 61,39%
317.692.807

Pada tahun 2023, Ditjen Gakkum LHK memperoleh pagu awal sebesar Rp354.211.103.000,00. Namun dengan diberlakukannya *automatic adjustment* sebanyak dua kali menjadikan berkurangnya ruang penggunaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

Selain karena *automatic adjustment*, anggaran Ditjen Gakkum LHK juga mengalami penyesuaian karena penambahan Top Up Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Alokasi Anggaran Top Up PNBP Tahun 2023

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kesehatan



INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA	TARGET RENJA SEMULA	TARGET RENJA MENJADI	ANGGARAN RENSTRA	ANGGARAN RENJA 2023 SEMULA	ANGGARAN RENJA 2023 MENJADI
-------------------	----------------	---------------------	----------------------	------------------	----------------------------	-----------------------------

1. PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

PERSENTASE PEMEGANG IZIN YANG TAAT TERHADAP PERATURAN TERKAIT BIDANG LHK

68 Persen	51 Persen	51 Persen	42.846.020	32.055.816	47.346.256
-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------

JUMLAH KASUS PIDANA DAN PERDATA YANG DITANGANI

498 Kasus	250 Kasus	474 Kasus	74.624.730	72.218.765	132.914.675
-----------	-----------	-----------	------------	------------	-------------

3. PROGRAM HUTAN BERKELANJUTAN

LUAS HUTAN YANG DIAMANKAN DARI GANGGUAN DAN ANCAMAN

900.000 Hektar	300.000 Hektar	300.000 Hektar	55.549.250	46.034.639	79.528.947
----------------	----------------	----------------	------------	------------	------------

5. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

NILAI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

78 Poin	78 Poin	78 Poin	233.652.594	203.901.883	257.662.735
---------	---------	---------	-------------	-------------	-------------

Automatic Adjustment 2023

Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S.1040 tahun 2022 perihal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023, dan Memorandum Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor M.41 Tahun 2022 *Automatic Adjustment* KLHK Tahun 2023, telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Surat Nomor S. 239 Tahun 2022 tanggal 21 Desember tentang Pencadangan Anggaran (*Automatic Adjustment*) Belanja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 dan tidak berubah setelah Penambahan Anggaran TOP UP PNB, sebagai berikut.

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	PAGU ANGGARAN TOP UP PNB Rp.517.452.613.000,-	AUTOMATIC ADJUSTMENT Rp.21.697.366.000,-
Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi LHK	Rp. 26.242.886.000,-	Rp. 1.500.000.000,-
Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Rp. 29.750.660.000,-	Rp. 1.500.000.000,-
Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 43.305.852.000,-	Rp. 1.543.144.000,-
Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 56.040.982.000,-	Rp. 1.500.000.000,-
Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK	Rp. 95.557.307.000,-	Rp. 8.354.222.000,-
Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatera	Rp. 61.921.084.000,-	Rp. 2.000.000.000,-
Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara	Rp. 57.721.723.000,-	Rp. 1.500.000.000,-
Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan	Rp. 58.270.821.000,-	Rp. 1.300.000.000,-
Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi	Rp. 49.100.209.000,-	Rp. 1.250.000.000,-
Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Maluku Papua	Rp. 42.541.089.000	Rp. 1.250.000.000,-

D) PROYEK PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023 (SEMULA-MENJADI)

Pro- PN	Rincian Output	Target Semula	Anggaran Semula	Target Menjadi	Anggaran Menjadi
Program: Pengelolaan Hutan Berkelanjutan			42.834.639		76.278.947
02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan SDA dan LH	001-Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	51 Operasi	20.944.639	71 Operasi	51.609.069
	002-Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	25 Operasi	21.890.000	28 Operasi	24.669.878
Program : Kualitas Lingkungan Hidup			99.586.701		173.303.051
02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan SDA dan LH	001- Pengawasan Ketaatan LHK terhadap Badan Usaha	750 Badan Usaha	28.255.816	1.045 Badan Usaha	41.276.256
	002-Penerapan Sanksi Administratif pada permasalahan penggunaan kawasan hutan	50 Badan Usaha	2.100.000	50 Badan Usaha	2.100.000
03-Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang SDA dan LH	001- Kasus Tindak Pidana LHK P21	160 Perkara	52.071.735	160 Perkara	52.071.735
	002- Berkas Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan	60 Perkara	6.150.000	250 Perkara	41.104.400
	001- Penanganan Sengketa LH	30 Perkara	11.009.150	64 Perkara	36.750.660
Total Anggaran Prioritas Nasional Tahun 2023			142.421.340		249.581.998

E) TARGET INDIKATOR KINERJA ESELON I TA 2023 (SEMULA-MENJADI)

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET RENJA 2023 SEMULA	SATUAN	TARGET RENJA 2023 MENJADI	SATUAN
Dukungan Manajemen (029.WA)	Nilai SAKIP Ditjen PHLHK	78	Poin	78	Poin
Kualitas Lingkungan Hidup (029. FD)	-01- Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan	51	Persen	51	Persen
Kualitas Lingkungan Hidup (029. FD)	-02- Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani	250	Kasus	483	Kasus
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (029.FF)	-03- Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	300.000	Hektar	300.000	Hektar

F) TARGET PER RINCIAN OUTPUT TA 2023 (SEMULA-MENJADI)

RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TOP UP PNBP TA 2023			
		SEMULA		MENJADI	
		TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)	TARGET	PAGU (Ribu Rupiah)
			354.211.103		517.452.613
Pengawasan Ketaatan LHK terhadap Badan Usaha	Badan Usaha	750	28.255.816	1.045	41.276.256
Penerapan sanksi administratif pada permasalahan penggunaan kawasan hutan	Badan Usaha	50	2.100.000	50	2.100.000
Peningkatan Kapasitas PPLH	Orang	220	1.700.000	420	3.720.000
Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup	Perkara	30	11.009.150	64	36.750.660
Kasus Tindak Pidana LHK P21	Perkara	160	52.071.735	160	52.071.735
Peningkatan kapasitas PPNS	Orang	180	2.987.880	180	2.987.880
Berkas penyelesaian permasalahan penggunaan kawasan hutan	Perkara	60	6.150.000	250	41.104.400
Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	Operasi	51	20.994.639	73	51.609.069
Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	Operasi	25	21.890.000	28	24.669.878
Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	Orang	210	3.200.000	230	3.500.000
Layanan Perkantoran	Layanan	6	184.389.874	6	184.389.874
Layanan Umum	Layanan	6	16.846.009	6	37.019.699
Layanan Sarana Internal	Unit	1	2.666.000	1	36.253.162

PENUTUP

Rencana Kerja Revisi Top Up PNBPN Tahun 2023 ini tak hanya berisi semangat untuk memperkuat apa yang telah dicapai di tahun 2022, namun demikian didalamnya memuat komitmen meletakkan landasan pencapaian pembangunan tahun 2023.

Rencana Kerja Revisi Top Up PNBPN Tahun 2023 ini memuat berbagai upaya dan keberhasilan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan berbagai tugas yang diembankan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan Rencana Strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Perubahan) tahun 2020 s.d 2024 serta Rencana Strategi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Perubahan) tahun 2020 s.d 2024, dengan hasil sesuai rencana yang diharapkan dan secara keseluruhan dapat mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pemantauan dari upaya pencapaian kinerja ini akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dalam bentuk Audit Kinerja, sedangkan Sekretariat Jenderal KLHK diharapkan dapat mengkoordinasikan pemantauan kinerja yang akan dituangkan ke dalam LAKIP Kementerian LHK di tahun 2023.



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2023

**Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4
Jalan Gatot Subroto, DKI Jakarta**